

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Sektor perbankan juga dianggap sebagai roda penggerak perekonomian suatu negara. Melalui kegiatan perkreditan dan jasa lain yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sistem perekonomian. Bank juga mempunyai peran sebagai pelaksana kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peranan perbankan saat ini sangat dominan dalam sistem keuangan, sehingga pemahaman dan pengelolaan bank yang baik tentunya akan mendorong sistem keuangan yang baik. Sejalan dengan kemajuan peradaban, teknologi informasi dan globalisasi perekonomian internasional, peranan bank semakin berkembang dan bidang usahanya pun semakin luas. Bank merupakan perusahaan dinamis yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Usaha bank bukan saja sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga pencipta alat-alat pembayaran, stabilisasi moneter dan dinamisator pertumbuhan perekonomian suatu negara. Bahkan bank mendorong terjalinnya hubungan perekonomian perdagangan internasional antar negara di dunia. Setiap perusahaan memanfaatkan jasa-jasa perbankan, karena kelancaran lalu lintas

pembayaran dan penagihan hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan jasa jasa perbankan.

Kinerja perusahaan merupakan hasil dari keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer dalam menjalankan suatu perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kinerja pasar dan kinerja keuangan. Kinerja pasar berhubungan dengan nilai perusahaan di pasar modal. Kinerja pasar suatu perusahaan mencerminkan seberapa baik prospek suatu perusahaan di mata investor. Berbeda dengan kinerja keuangan bersifat historis, yang artinya kinerja keuangan dihitung berdasarkan informasi-informasi sebelumnya. Kinerja keuangan perusahaan dilihat dari perbandingan rasio-rasio keuangan dengan menggunakan data akuntansi (Srimindarti, 2004)

Kinerja pasar atau nilai pasar merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual, semakin tinggi nilai perusahaan semakin besar pula kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan . Bagi perusahaan yang sudah go public maka nilai pasar ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran di bursa, yang tercermin dalam *listing price*. Berbeda halnya dengan perusahaan *unlisted firm*, yang nilai pasar ditetapkan oleh lembaga independen seperti perusahaan jasa penilai (Husnan dan Pudjiastuti, 2015). Bringham dan Houston (2010) menyatakan bahwa rasio nilai pasar (*market value ratio*) adalah rasio yang berhubungan dengan harga saham perusahaan terhadap laba, arus kas, dan nilai buku per sahamnya. Rasio nilai pasar memperlihatkan kepada manajemen tentang pandangan investor terhadap risiko dan prospek perusahaan di masa depan. Nilai pasar dan harga saham yang

mengalami peningkatan sesuai dengan yang diperkirakan diakibatkan oleh baik dan stabilnya rasio likuiditas, manajemen aset, manajemen utang, dan profitabilitas.

Untuk mengukur kinerja pasar atau nilai pasar dengan menggunakan rasio pasar. Rasio pasar adalah rasio yang mengukur harga pasar saham perusahaan, relatif terhadap nilai bukunya (Hanafi, 2004). Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasarkan pada sudut pandang investor ataupun calon investor, meskipun pihak manajemen juga berkemungkinan dalam rasio ini. Adapun rasio pasar terdiri dari *Price Earning Ratio (PER)*, *Price to Book Value (PBV)* dan *Tobin's Q* (Weston dan Copeland, 2008).

Tobin's Q ini lebih teliti tentang seberapa efektif manajemen memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomis dalam kekuasaannya. Black et al. (2003) merumuskan nilai pasar dari aset sebagai penjumlahan dari nilai buku dari hutang, nilai buku dari saham preferen, dan nilai pasar dari saham biasa. *Tobin's Q* adalah rasio nilai pasar ekuitas ditambah nilai total utang dibagi dengan nilai total aset masing-masing perusahaan. Aset yang diperhitungkan dalam *Tobin's Q* juga menunjukkan semua aset perusahaan tidak hanya ekuitas perusahaan. Semakin besar nilai rasio *Tobin's Q* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan memiliki *intangible asset* yang semakin besar

Brealey dan Myers (2000) menyebutkan bahwa perusahaan dengan nilai Q yang tinggi biasanya memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai Q yang rendah umumnya berada

pada industri yang sangat kompetitif atau industri yang mulai mengecil. *Tobin's Q* ditemukan oleh seorang pemenang hadiah Nobel dari Amerika Serikat yaitu James Tobin (1969). Oleh sebab itu pada perusahaan perlu ditingkatkan nilai pasar karena dengan nilai pasar yang bagus mempengaruhi investasi perusahaan sehingga menjadi nilai yang dapat ditukarkan oleh perusahaan. Tingkat harga saham merupakan pendongkrak investasi perusahaan yang biasanya dihubungkan dengan nilai pasar.

Kinerja pasar Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan. Menurut Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat, pasar keuangan yang tercermin dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dipandang terganggu akibat sejumlah serangan teroris di Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Untuk memulihkan kondisi pasar keuangan kembali stabil, dibutuhkan waktu hingga dua bulan. Penyesuaian suku bunga acuan diharapkan dalam rangka meredam volatilitas di pasar keuangan, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kepercayaan kepada pelaku pasar. Kondisi pasar keuangan menampilkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah di level 5.780,87 dan sempat terus merosot hingga level 5.743,33 pada siang. Namun saat penutupan perdagangan, IHSG tercatat menguat ke level 5.841. Dikutip dari kompas.com pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018.

Walaupun Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode CMLST tetapi tanggal 25 Oktober 2011 penilaian tingkat kesehatan bank diperbaiki menggunakan metode

Risk-Based Bank Rating (RBBR). Pengukuran tingkat kesehatan bank digunakan menggunakan metode RGEC terdiri dari empat faktor yaitu profil risiko (*risk profil*), *Good Corporate Governance* (GCG), rasio bilitasi (*ratings*) dan modal lain (*capital*).

Studi terdahulu banyak membahas mengenai tentang kinerja pasar yang diukur dengan *Tobin's Q* (Amalia Sabrina Irianti, 2017; Herni Kurniawati, 2016; Tria Syafitri, 2018). Berdasarkan penelitian Amalia Sabrina Irianti (2017), NPL dan LDR secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur oleh *Tobin's Q*. Kemudian pada penelitian Herni Kurniawati (2016) *board size* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang diukur oleh *Tobin's Q*. Hasil penelitian Tria Syafitri (2018) menyatakan *board commissioners* atau dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Tobin's Q*.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pasar perusahaan yaitu manajemen risiko dan *corporate governance* atau tata kelola perusahaan. Penelitian sebelumnya memperoleh hasil yang beragam dan sangat sedikit penelitian mengenai *Tobin's Q* pada perbankan serta masih tidak konsistennya hasil penelitian sehingga penulis tertarik untuk menganalisis tentang faktor manajemen risiko dan *corporate governance* sebagai faktor penting yang mempengaruhi kinerja pasar perbankan di Indonesia.

Risk profil merupakan nilai terhadap faktor profil risiko yang merupakan risiko inherent dan ku litasi p n r p n m n j m n risiko di l m o p r s i o n l b n k y n g t r d i r i d r i r i s i k o k r d i t, r i s i k o p s r, r i s i k o l i k u i d i t s,

risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko reputasi (POJK No.18/POJK.03/2016). Berbagai risiko tersebut hanya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional yang digunakan dalam perhitungan penentuan tingkat kesehatan bank dan menjadi acuan peneliti dalam penelitian ini.

Perhitungan risiko kredit diukur dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL). *Non performing loan* (NPL) juga merupakan faktor internal yang digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap nilai pasar kredit ke debitur. NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. Menurut Dendawijaya (2009), risiko kredit bermasalah merupakan risiko yang timbul sebagai akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban nasabah kredit untuk membayar angsuran pinjaman maupun bunga kredit pada waktu yang sudah disepakati antara pihak bank dan nasabah (debitur) kredit. Masalah yang bersumber dari kredit bermasalah memang membuat bank berhati-hati dalam memberikan dana.

Menurut Siamat (2004) resiko kredit merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidak mampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang telah diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Bank Indonesia (BI) mencatat rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) *gross* sedikit meningkat menjadi 2,9 persen pada Januari 2018. Sementara itu, NPL net menjadi 1,3 persen pada bulan yang sama.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia Sabrina Irianti dan Muhammad Saifi (2017) dapat dilihat bahwa NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproxykan dengan *Tobin's Q* karena adanya faktor *income*. Bank melakukan inovasi dalam produk dan jasa lainnya yang ditawarkan, maka dari itu sumber pendapatan bank tidak lagi bergantung hanya pada *interest income* dan pendapatan *business income* (pendapatan non bunga).

Risiko likuiditas diukur dengan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi bank karena ketidakmampuan bank dalam menyediakan dana untuk memenuhi penarikan simpanan dan permintaan kredit serta kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/19/2010, menetapkan LDR bank umum berada pada kisaran 78-100%. Apabila LDR berada di bawah maupun di atas ketentuan BI menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan kredit. Berdasarkan statistik perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2018 posisi LDR secara industri mengalami peningkatan yaitu berada di level 91,89%. Posisi ini meningkat dibandingkan Mei 2017 yang sebesar 86,67%.

Sedikitnya penelitian mengenai LDR terhadap *Tobin's Q* dengan itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amalia Sabrina Irianti dan Muhammad Saifi (2017) yang menunjukkan LDR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diproxykan dengan *Tobin's Q*. LDR dapat berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan karena dalam hal ini investor akan lebih memilih bank yang mampu membayar dengan model tu

perbandingan risiko di bank tersebut bisa lebih rendah jika dibandingkan dengan bank lain yang dimilikinya.

Risiko operasional diukur dengan rasio BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional). Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Semakin kecil angka rasio BOPO, maka semakin baik kondisi bank tersebut (Martono, 2002:85). Rasio Biaya Operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara yaitu menghimpun dan menyalurkan dana maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga (Farah Margaretha, 2007) .

Kinerja perbankan di awal tahun 2018 semakin efisien. Hal tersebut tercermin dari tren penurunan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) di bulan Januari 2018. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, bank memiliki rasio BOPO sebesar 81,8% per akhir Januari 2018. Jumlah tersebut menurun bila dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2017 yang berada di posisi 83,94%. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sundus Nur Halimah dan Euis Komariah (2017) menemukan bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Selanjutnya adanya faktor lain yang turut mempengaruhi hubungan manajemen risiko dan kinerja pasar yaitu tata kelola perusahaan atau *Corporate Governace*. Konsep *corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme

untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Inti dari *corporate governance* adalah adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, yaitu untuk mengatasi masalah permasalahan keagenan (*agency problem*). Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*.

Berbagai peristiwa dalam darsawarsa terakhir telah menjadikan *corporate governance* menjadi isu penting di kalangan eksekutif, *non government organization (NGO)*, konsultan korporasi, akademisi, dan pembuatan kebijakan (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Isu yang terkait dengan *corporate governance* seperti *insyder trading*, transparansi, akuntabilitas, independency, etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan perlindungan investor telah menjadi ungkapan lazim di bicarakan dikalangan pelaku usaha (Serdamayanti, 2012).

Corporate governance juga telah menjadi salah satu penting bagi pelaku usaha di Indonesia dimana dampak negatif merugikan bangsa ini yaitu maraknya praktek tidak sehat, baik di instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat

sehingga budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berakar dan berkembang secara kronis. Kondisi buruk tersebut, merupakan pemicu untuk mempengaruhi tata kelola perusahaan yang mengakibatkan kinerja perusahaan rendah, baik pada perusahaan swasta maupun BUMN. Perusahaan berlangsung dengan biaya ekonomi tinggi, inefisiensi, kebocoran dan pemborosan, kualitas hasil rendah, pelayanan pada masyarakat buruk, sehingga secara keseluruhan daya saing perusahaan rendah, nilai perusahaan di mata investor rendah, kepercayaan pemegang saham dan semua pihak terkait rendah, yang pada akhirnya kinerja perusahaan akan rendah.

Pada penelitian ini *Corporate Governace* di proxykan dengan *Board Size* (ukuran dewan) dan *Board Commissioners* (dewan Komisaris). Hanas (2009) menyatakan bahwa board adalah pimpinan pada organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan dan mengawasi pemakaian sumber daya agar sesuai dan sejalan dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Bringham dan Houston (2010) menyatakan bahwa memaksimalkan kekayaan pemegang saham dalam jangka panjang adalah tujuan utama manajemen keuangan. Board yang dimaksudkan dalam konteks perusahaan Indonesia adalah dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan direksi dan dewan komisaris adalah pihak yang bertanggung jawab dan memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan tentang melakukan pengarahan, pengendalian, dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Ukuran dewan memiliki dua model diantaranya adalah Sistem

Jerman kontrol korporat (model *twotier*) dan Sistem Inggris kontrol korporat (model one-tier).

Pfeffer & Salancik (1978) menjelaskan bahwa peningkatan kebutuhan akan personel komisaris yang besar disebabkan oleh semakin besarnya kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif. Pada penelitian Herni Kurniawati (2016) menjelaskan bahwa *Board size* atau ukuran dewan dalam perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang diukur dengan jumlah dewan komisaris dan dewan direksi. Hal ini menunjukkan bahwa yang menyatakan bahwa *board size* yang lebih besar akan membuat pemantauan manajemen secara lebih efektif (*agency theory*). Sementara Wahyudi (2010) menemukan bahwa ukuran dewan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

Dewan komisaris dibentuk oleh pemilik perusahaan untuk memastikan bahwa manajemen mengelola perusahaan dengan baik adalah mekanisme corporate governance yang tepat. Untuk dapat menciptakan sistem corporate governance yang baik pada perusahaan public di Indonesia, maka akuntabilitas dewan komisaris yang selama ini diragukan harus ditingkatkan, antara lain dengan cara membentuk komisaris independent dan komite audit (Apriyanti dan Juliarto, 2006).

Disadari sepenuhnya bahwa keberadaan dewan komisaris sebagai bagian utama mekanisme internal governance perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam upaya memperkuat implementasi di Indonesia. Peran lebih aktif dewan komisaris dalam proses governance lebih jauh di harapkan dalam meredamkan

konflik kepentingan anatar stakeholders, meningkatkan kinerja, akses terhadap sumber pembiayaan internasional, serta daya saing perusahaan (Niki Lukviarman, 2016).

Hubungan antara jumlah anggota dewan komisaris dengan nilai perusahaan didukung oleh perspektif fungsi service dan control yang dapat diberikan oleh dewan. Karena kedua fungsi tersebut lebih cenderung diberikan oleh dewan komisaris untuk kondisi struktur corporate governance. Berdasarkan penelitian oleh Kawatu (2009) menyatakan bahwa pengaruh dewan komisaris terhadap nilai perusahaan adalah positif signifikan. Sedangkan menurut Tria Syafitri (2018) menyatakan bahwa pengaruh dewan komisaris terhadap *Tobin's Q* berpengaruh signifikan negatif dimana dengan meningkatkan Dewan Komisaris maka *Tobin's Q* tidak mengalami peningkatan

Berdasarkan latar belakang masalah dan peneliti terdahulu yang kontradiktif diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui informasi manakah yang paling akurat antara penerapan manajemen risiko yang diukur dengan Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional dan *Corporate Governance* yang diukur dengan *Board Size* dan *Board Commissioners* yang lebih mempengaruhi kinerja pasar yang di proxykan dengan *Tobin's Q* pada Perbankan dengan judul **“Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko dan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Berdasarkan dari uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko dan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah, maka peneliti ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko dan Corporate Governance terhadap Kinerja Pasar pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penerapan manajemen risiko dan *corporate governace* terhadap kinerja pasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun manfaat kontribusi dari penelitian ini adalah :

A. Secara teoritis

Merupakan suatu kesempatan untuk menerapkan teori-teori ekonomi yang diperoleh dibangku perguruan tinggi negeri kedalam praktik-praktik yang sesungguhnya. Dalam hal ini berkontribusi pada pengembangan keilmuan.

B. Secara praktis

Sebagai bahan bacaan untuk referensi penelitian-penelitian berikutnya